

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1. Latar Belakang**

Desa diatur dalam Undang Undang Desa tahun 2014 pasal satu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia(UU Desa, 2014; 2). Desa berhak untuk menyelenggarakan pesta demokrasi, untuk Pemilihan Kepala desa yang sering disingkat dengan Pilkades. Pilkades merupakan sebuah proses dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Pilkades merupakan proses untuk memilih atau dipilihnya orang yang mampu untuk memimpin jalannya pemerintahan di wilayah desa tertentu, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Proses sosial ini tentunya memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada warga masyarakat desa untuk menunjukkan partisipasi politiknya, baik sebagai hak pilih maupun sebagai hak untuk dipilih (Saleh, 2014; 18). Adanya persamaan hak diantara warga masyarakat akan menimbulkan persaingan sosial untuk memperoleh kekuasaan yang diinginkan dengan berbagai cara dan usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Masing-masing calon kepala desa akan melakukan pendekatan tersendiri terhadap masyarakat dengan maksud untuk menarik perhatian dan simpati warga.

Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh perundang-undangan pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan daripada hakikat yang diinginkan oleh pilkades yaitu pemerintahan desa, di samping itu penyelenggaraan pilkades juga tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan, sehingga budaya sangat berperan di dalamnya. Seiring dengan hal ini di dalam pelaksanaan pilkades tidak jarang menuai kericuhan, konflik, bahkan disintegrasi dalam suatu kelompok masyarakat. Di dalam

penyelenggaraan pilkades ini terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik pilkades, yang diwarnai dengan kericuhan, kekerasan, yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakatnya (Saleh, 2014; 22). Dalam hal ini kebudayaan bersinggungan dengan kepentingan politik. Sehingga masyarakat terlena dan lupa diri akan pentingnya kekeluargaan dan keteraturan sosial hanya demi kepentingan politik, yaitu memenangkan calon mereka masing-masing dan berusaha untuk mengalahkan calon yang lain sebagai lawan politiknya.

Keinginan peneliti untuk mengulas lebih mendalam objek penelitian dalam hal ini pilkades merupakan respon dari gejala-gejala sosial yang timbul ditengah masyarakat khususnya pada warga Desa Kendung, Kabupaten Bojonegoro, sebagai lokasi penelitian. Gejala-gejala sosial dimaksud timbul sebagai persoalan baru yang mampu mempengaruhi masyarakat. Seperti yang dijelaskan bahwa terjadi hubungan-hubungan sosial yang sebelumnya tidak pernah terjadi, baik antar individu maupun antar kelompok. Peneliti melihat hal ini sebagai sebuah fenomena sosial yang sangat menarik, karena hingga pasca pelaksanaan pilkades pun warga di Desa Kendung masih ada “konflik” dan suatu kelompok pengajian besar yang diisi oleh bapak-bapak, terpecah menjadi 3 kelompok karena dampak dari pilkades tersebut. Situasi seperti ini mengundang Peneliti untuk mengulas dan mengkaji lebih mendalam.

Peneliti juga memandang konflik merupakan suatu yang penting dalam ilmu sosial dan bidang antropologi sosial. Pertama konflik bukanlah isu yang sepele, bahkan dianggap sebagai salah satu bidang studi utama ilmu sosial. Kedua konflik tidak selalu negatif, namun sering memenuhi fungsi positif dalam masyarakat dan dunia sains. Ketiga, ilmu sosial yang dibahas adalah segala sesuatu yang sarat dengan konflik. Studi mengenai konflik-konflik dalam masyarakat merupakan salah satu stimulus utama dalam penajaman dan pengembangan pengetahuan mengenai struktur-struktur dan tindakan-tindakan sosial (Cosser dan Larsen, 1976; Harskamp, 1996; 4).

Seperti yang ada di dalam jurnal karya Saleh Syahputra Siregar yang terbit di dalam jurnal POLITEA januari tahun 2014, yang berjudul “Konflik Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Sayur Mahincat Tahun 2011”. Artikel ini juga menjelaskan bahwa terdapat Konflik yang kompleks dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Sayur Mahincat, mulai dari sebelum pemilihan, saat pemilihan dan setelah pemilihan. Namun dalam jurnal ini membahas tentang masalah administrasi, jadi membahas permasalahan apa saja yang ada di dalam penyelenggaraan pemilihannya, tidak dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Perbedaan yang ada dari jurnal karya Saleh Syahputra Siregar dan penelitian ini adalah pada fokusnya, apabila jurnal karya Saleh Syahputra membahas tentang permasalahan administrasi dan pelaksanaannya dengan hanya sedikit memasukan permasalahan dalam masyarakat desa tersebut, kebalikanya dalam penelitian ini memiliki fokus untuk menjelaskan bagaimana permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Desa Kendung, dengan menyampingkan permasalahan administratif karena di Desa Kendung memiliki kasus yang berbeda, tidak ada persoalan tentang administratif pemilihan namun ada yang lebih jauh terjadi dalam masyarakat sehingga terjadi konflik yang terjadi.

Terdapat pula hasil penelitian dari Eka Mardiana Susanti dari Universitas Jember tahun 2011, yang berjudul “Dampak Konflik Pilkades (Studi Kasus di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek), topik yang dibahas dan diteliti oleh Eka Mardiana Susanti ini juga membahas dampak konflik yang terjadi setelah diselenggarakan Pilkades. Konflik yang terjadi memang tentang konflik yang terjadi setelah Pilkades, bahkan rentang waktu setelah Pilkadesnya pun sama sekitar 3 tahun setelahnya, namun latar belakang terjadinya konflik setelah Pilkades ini berbeda, apabila di Desa Ngares, Trenggalek terjadi karena ada dugaan kuat panitia melakukan “kecurangan”, berbeda dengan Desa Kendung yang untuk proses penghitungan suara tidak ada permasalahan namun yang ada permasalahan yang lebih kompleks, yakni bermula dari sebelum diselenggarakan Pilkades. Kondisi desa juga jauh berbeda, di Desa Ngares, Trenggalek dalam

tulisan skripsi Eka Mardiana disebutkan sangat *chaos*, berikut kondisi yang diceritakan dalam skripsi tersebut:

“Dampak yang diakibatkan oleh Pemilihan Kepala Desa Ngares, pasca penghitungan suara, pihak Ahmad Thohar melakukan protes dan mengintimidasi panitia. Akibatnya, Panitia Pilkades Ngares memberikan pernyataan bahwa, tidak sahnya kartu suara tersebut bukan karena kesalahan pemilih dalam mencoblos, akan tetapi karena disebabkan kekhilafan panitia. Hasilnya, Ahmad Thohar terpilih menjadi Kepala Desa Ngares. Setelah itu para pendukung Kasiran tidak terima, mereka menuduh telah terjadi konspirasi antara panitia dan pihak Matohar; Balai Desa Ngares disegel oleh para pendukung Kasiran. Akibatnya, roda pemerintahan tidak berjalan; para pengurus PKK mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan terpilih; massa pendukung Kasiran melakukan demo, hal ini disebabkan kebijakan yang diambil kepala desa yang menjabat sekarang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kepala desa tidak diperbolehkan lewat jembatan RT 07 yang berbasis massa calon Kades Kasiran”(Eka, 2011).

Kondisi ini kontras dengan kondisi yang ada di Desa Kendung, di Desa Kendung tidak terjadi gejolak yang terlalu ekstrim, karena konflik tidak terjadi karena bukan ada indikator kecurangan, namun ada kampanye uang yang dibagikan melalui renovasi rumah. Jadi tidak ada permasalahan dengan pemerintah Desa yang saat ini menjabat terutama Kepala Desa, namun ada hal yang tidak bisa ditutupi yakni sering *rasan-rasan* Kepala Desa yang sekarang menjabat oleh pendukung calon Kades yang kalah, serta ada jurang pemisah dalam kegiatan bersosial antar warga yang ditemukan peneliti selama berada di Desa Kendung.

Berangkat dari fenomena yang ada di Desa Kendung dari dampak Pilkades 3 tahun lalu, dan pendapat mengenai pandangan pembahasan konflik. Maka Peneliti memiliki pemikiran utama dalam Penelitian ini adalah mengenai dampak dari pilkades.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari fenomena yang terjadi di Desa Kendung, mengenai dampak dari pilkades, maka Peneliti membuat beberapa rumusan masalah, yakni.

1. Bagaimana proses berjalannya pilkades 2014 di Desa Kendung?
2. Bagaimana konflik pilkades 2014 yang berlangsung di Desa Kendung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan semua permasalahan sesuai dengan rumusan masalah yang muncul.

1. Awal mula dari permasalahan konflik dan hubungan masyarakat Desa Kendung dengan adanya pilkades 2014.
2. Mengetahui dampak adanya pelaksanaan pilkades 2014 di Desa Kendung.
3. Mengetahui dan menganalisis konflik yang terjadi pada Masyarakat Desa Kendung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terkait dengan permasalahan penelitian ini antara lain:

1. Sebagai bahan refleksi tentang penyelenggaraan pilkades.
2. Menjadi bahan bacaan untuk memahami potensi konflik dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial hasil dari dampak pilkades.

## **1.5 Kerangka Konsep**

Manusia tidak lepas dengan kebudayaan, manusia hidup secara berbudaya atau memiliki suatu kebudayaan (Koentjaraningrat, 74 : 1996). Kehidupan politik di Indonesia terutama di daerah pedesaan sangat bercampur dengan budaya masyarakat setempat, yang berakhir ketidak sesuaian atau terjadinya konflik sosial. Konflik belakangan ini marak terjadi di Tanah Air Indonesia. Konflik yang banyak terjadi adalah adanya suatu kepentingan politik mengakibatkan adanya pergeseran hubungan atau relasi sosial yang semula baik-baik saja atau terintegrasi, menjadi mulai adanya permasalahan yang menuju disintegrasi.

Demikian halnya dengan Pemilihan Kepala desa di Desa Kendung, Kabupaten Bojonegoro yang menuai konflik yang bersumber dari pesta demokrasi ini. Bahkan permasalahannya pun sudah 3 tahun pasca pilkades masih terjadi perpecahan ini. Menjadi permasalahan ketika mengapa tidak ada sebuah penyelesaian konflik yang menyeluruh hingga konflik di Desa Kendung tuntas. Peneliti beranggapan timbulnya konflik di Desa Kendung adanya pihak tertentu yang terlibat dalam konflik bukan untuk mencapai suatu tujuan melainkan untuk menikmati konflik itu sendiri. Hal ini terlihat dari 3 tahun pasca pilkades pun konflik masih ada dan terjadi perpecahan dalam masyarakatnya.

Sebelumnya sudah disebutkan dalam pembahasan latar belakang, terdapat penelitian dari Saleh Syahputra Siregar yang di publikasi melalui jurnal POLITEA Universitas Sumatra Utara yang berjudul Konflik Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Sayur Mahincat Tahun 2011. Pada penelitian ini membahas tentang konflik yang terjadi karena penyelenggaraan Pemilihan Kepala desa, penelitian ini juga menyebutkan terdapat beberapa penyebab konflik yang terjadi dalam Pemilihan Kepala desa tersebut. Pertama adalah pada masa penjaringan bakal calon kepala desa, terdapat salah satu bakal calon kepala desa yang tidak dapat menjadi salah satu calon kepala desa (Saleh, 2014; 22), kedua adalah permasalahan pendataan pemilih, kesalahan ini dilakukan oleh panitia karena tidak melakukan pendataan yang tepat hingga terjadi unjuk rasa (Saleh, 2014; 23), ketiga adalah pada masa kampanye yang terjadi banyak pelanggaran mulai dari kampanye negatif yang menjelek-jelekan calon lainnya, dan praktek *money politic* dengan pemberian uang tunai secara langsung sebesar Rp.30.000 (Saleh, 2014; 24).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis konflik sosial masyarakat Desa Kendung. Berdasarkan latar belakang, dan tujuan penelitian menurut peneliti konsep yang paling bisa digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena sosial ini, yakni teori konflik Ralf Dahrendorf dan teori konflik Lewis A. Coser. Dari teori dan gagasan tentang konflik yang dikemukakan oleh para pencetus, yang paling membuat

peneliti semakin yakin bahwa teori konflik dari Ralf Dahrendorf dan Lewis A. Coser, adalah dari pemikiran Coser, yakni

“Coser tidak mencoba menghasilkan teori menyeluruh yang mencakup seluruh fenomena sosial. Karena ia yakin bahwa setiap usaha untuk menghasilkan suatu teori sosial menyeluruh yang mencakup seluruh fenomena sosial adalah premature (sesuatu yang sia-sia)”(Zulkifli, 2017; 91).

Peneliti mengacu pada asumsi pemikiran Lewis A. Coser tentang bagaimana untuk memandang suatu fenomena sosial terutama konflik, bahwa tidak ada teori yang bisa mencakup seluruh fenomena sosial, serta dalam seluruh kehidupan bersosial, konflik tidak bisa dipisahkan, konflik akan hilang jika masyarakatnya juga hilang.

Sebelum jauh membahas konflik, mula-mula harus dibedakan bahwa ada kekerasan dan konflik. Kekerasan dan konflik bukanlah hal yang sama, suatu konflik tidak selalu mengandung unsur kekerasan. Konflik tidak selalu dimaknai dengan konotasi negatif, namun jika konflik tidak dapat dikendalikan dan semakin liar, maka konflik bisa berkembang menjadi bentuk kekerasan. Jadi dapat dikatakan bahwa kekerasan muncul setelah adanya konflik yang tidak terkendali (Novri, 2010; 24).

Ralf Dahrendorf mengemukakan tentang teori konflik dengan sumber konfliknya bahwa, masyarakat terdiri atas kekuasaan dan wewenang, kekuasaan adalah dominasi satu pihak atas pihak lain atas dasar paksaan, sedangkan wewenang adalah dominasi yang diterima dan diakui oleh pihak yang didominasi. Pihak yang penguasa berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan pihak yang dikuasai ingin memperoleh kekuasaan yang dapat menyebabkan perubahan sosial (Ellya, 2015; 219). Terdapat pula 4 pokok pemikiran Dahrendorf tentang konflik, yakni: 1.) Setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan. 2.) Disensus dan konflik terdapat dimana-mana. 3.) Setiap unsur masyarakat memberikan sumbangan pada disintegrasi dan perubahan dalam masyarakat. 4.) Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan anggota lain.

Coser berpendapat bahwa konflik adalah perjuangan mengenai nilai serta tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumberdaya dengan cara mencederai lawan ataupun melenyapkan lawan (Ellya, 2015; 221). Mencederai tidak mengenai mencederai fisik, namun mencederai peraturan yang ada, melakukan kecurangan juga bisa disebut dengan mencederai. Pemikiran Coser tentang fungsi konflik, berpendapat bahwa konflik tidak selamanya bersifat disfungsional, namun konflik memiliki konsekuensi positif.

Pertama dalam pemikiran Dahrendorf, konflik tidak akan bisa berdiri sendiri untuk dianalisis, konflik ada berdampingan dengan konsensus yang dibangun dalam masyarakat (Aniek; 12, repository.uin-malang.ac.id, diakses 27 Februari 2018). Hal ini juga selaras dengan pemikiran Coser tentang fungsi konflik dengan berlandaskan dari ide-ide Simmels, berpendapat bahwa konflik tidak selamanya bersifat disfungsional, namun konflik memiliki konsekuensi positif (Zulkifli, 2017; 92). Jadi pokok pemikiran kedua tokoh ini, bahwa konflik merupakan bukan semata-mata fenomena yang hanya bersifat disfungsional, menyebabkan disintegrasi, dan dampak-dampak negatif lainnya, namun jauh ditelaah bahwa ada fungsi laten atau tersembunyi yang bisa dianalisis dan ditelaah. Namun tetap Dahrendorf mengatakan bahwa “Mustahil menyatukan teori untuk menerangkan masalah yang telah membingungkan pemikir sejak awal perkembangan filsafat Barat” (Aniek; 12, repository.uin-malang.ac.id, diakses 27 Februari 2018).

Kedua, Dahrendorf dan Coser juga memiliki kesamaan pandangan dalam memandang unsur kunci dalam konflik, yakni otoritas atau dominasi, karena dominasi secara gamblang membentuk adanya superordinasi dan subordinasi, atau adanya atasan dan bawahan (Zulkifli, 2017; 122). Hal ini menyebabkan seakan-akan membentuk suatu realitas bahwa mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada di sekitar mereka, sehingga sejalan dengan kasus konflik yang ada di Desa Kendung yakni tentang Pemilihan Kepala Daerah. Kelanjutan dari adanya suatu otoritas adalah kepentingan, memang banyak tokoh pencetus teori konflik berpendapat kepentingan juga merupakan salah satu unsur kunci dalam terciptanya konflik, hal ini juga dikembangkan lagi oleh Dahrendorf, yang

diklasifikasikan menjadi dua konsep kepentingan tersembunyi dan kepentingan nyata. Kepentingan tersembunyi merupakan suatu “harapan” yang tidak disadari oleh pihak subordinat, dan “harapan” ini dibuat oleh superordinasi untuk melaksanakan aksi, subordinat “menyesuaikan” atau “disesuaikan” agar bisa menyumbangkan konflik. Kebalikanya kepentingan nyata merupakan kepentingan yang sudah gamblang disadari oleh para pelaku konflik, namun kepentingan nyata ini tidak perlu diketahui oleh semua pihak (Aniek; 15, repository.uin-malang.ac.id, diakses 27 Februari 2018).

Ketiga, konflik dapat memberikan dampak positif terhadap integrasi, hal inilah yang dikemukakan oleh Coser, serta dipertegas oleh Pierre van den Berghe, sebagai berikut (Ellya, 2019; 222-223): 1.) Sebagai alat pemelihara solidaritas. 2.) Menciptakan persatuan atau aliansi dengan kelompok lain. 3.) Memberikan peran individu yang sebelumnya terisolasi. 4.) Fungsi komunikasi, yang berkaitan dengan identitas individu dan kelompok yang mana akan memberikan posisi dan batas yang jelas antar kelompok yang berkaitan.

Meskipun disebutkan bahwa konflik akan memberikan dampak positif terhadap integrasi, namun bentuk integrasi yang terjadi akan menimbulkan adanya suatu perlawanan sehari-hari (Scott, 2000; 40). Perlawanan sehari-hari ini dilakukan karena pihak yang lemah akan melakukan perlawanan, namun tidak melalui pemberontakan, namun dilakukan sehari-hari dan dalam bentuk simbol yang dilakukan dalam ranah segi sosial (Scott, 2000; 49). Pihak yang lemah tidak memiliki kekuatan untuk melawan langsung, sehingga dilakukanlah perlawanan sehari-hari yang tidak bersifat konfrontatif. Perlawanan bentuk simbolis ini bisa dalam bentuk, gosip, fitnah, hujatan dan perusakan nama baik (Scott, 2000; 33). Bahkan ada titik tertentu pihak yang lemah ini memiliki perilaku “di atas pentas” dan “di luar pentas”, “di atas pentas” ini seakan menunjukkan penghormatan terhadap namun “di luar pentas” memiliki maksud untuk merendahkan atau melawan (Scott, 2000; 34). Perlawanan sehari-hari ini juga ada bentuk perilaku kepatuhan semu, seperti menerima undangan dari pihak yang kuat hanya untuk

kepentingan pribadi bukan untuk bertujuan menghadiri undangan tersebut (Scott, 2000; 35-36)

Dampak positif tersebut masih bersifat konflik umum, terdapat lagi yakni konflik politik. Konflik politik dibedakan lagi menjadi dua yakni (Ramlan, 1999; 153): 1.) Konflik Positif, adalah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, serta yang biasanya dilakukan melalui mekanisme yang sudah disepakati secara konstitusi. 2.) Konflik Negatif, adalah yang mengancam eksistensi sistem politik, dan dilakukan secara nonkonstitusi, yakni dengan revolusi, kudeta, separatis dan terorisme. Dalam kasus Pemilihan Kepala desa, seharusnya termasuk dalam konflik positif karena masih dalam ranah dan dilakukan secara mekanisme konstitusi, dan sudah diatur oleh undang-undang serta ada lembaga yang mengawasi dan melaksanakan. Namun ada variabel lain yang akhirnya pemilu, pilkada, pilkades tidak bisa disebut murni konflik positif, yakni adalah tingkat keamanan masyarakat.

“Masyarakat yang belum mapan, merupakan masyarakat yang belum memiliki struktur kelembagaan yang mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat. Biasanya struktur kelembagaan yang diatur dalam konstitusi selain tidak didukung oleh sebagian masyarakat, juga belum berfungsi sebagaimana mestinya. Konflik yang dianggap positif dalam masyarakat ini acap kali justru konflik yang disalurkan melalui cara-cara diluar struktur kelembagaan yang ada karena dianggap lebih efektif”(Ramlan, 1999; 153)

Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Ramlan, bahwa terdapat satu variabel lagi yang mempengaruhi yakni tingkat keamanan masyarakatnya, dalam hal ini yang membuat tidak selalu sama dalam kasusnya.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Desa Kendung, Kabupaten Bojonegoro. Lokasi ini desa ini bisa ditempuh dengan sepeda motor dan mobil dengan memakan waktu sekitar empat jam lebih. Lokasi desa ini terpencil, berada diperbatasan

Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan, bahkan dengan Kabupaten Lamongan hanya dibatasi oleh sungai kecil.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kendung, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro adalah peneliti pernah melakukan observasi selama satu bulan di tempat tersebut dan menemukan sebuah fenomena sosial yang menarik, terutama terkait dengan konflik.

### **1.6.2 Teknik Pemilihan Informan**

Untuk pemilihan informan peneliti menggunakan konsep dari spradley tentang syarat untuk memilih informan. Ada lima syarat yang disarankan Spradley untuk memilih informan yang baik, yaitu, enkulturasi penuh, keterlibatan langsung, suasana budaya yang tidak dikenal, waktu yang cukup, non-analitis (Spradley, 1997; 61). Enkulturasi penuh, artinya mengetahui budaya yang menjadi miliknya dengan baik, informan mengetahui latar belakang budaya dengan baik. (Spradley, 1997; 62)

Pada konsep kedua Spradley adalah keterlibatan langsung, pada saat penelitian berlangsung peneliti melihat dan mengamati kegiatan informan. Adanya interaksi dan kedekatan yang dapat terjalin ketika peneliti ikut kegiatan informan karena peneliti dapat mengamati kondisi sosial budaya serta perilaku masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga dapat memperoleh data sesuai dengan keadaan lapangan. (Spradley, 1997; 64). Pada konsep ini peneliti mendapatkan informan langsung pada saat mengikuti segala kegiatan masyarakat di lapangan terutama menggunakan pengalaman dari observasi selama satu bulan, sehingga peneliti sudah memiliki ikatan yang terjalin sebelumnya.

Memiliki waktu yang cukup, dalam hal ini peneliti mencari waktu luang yang dimiliki informan. Diharapkan informan dapat meluangkan waktu untuk memberikan jawaban dari pertanyaan wawancara dari peneliti secara lepas dan tidak tertekan dan tidak dikejar waktu akan kesibukannya (Spradley, 1997; 68). Apabila informan memiliki sedikit waktu maka dapat diberlakukan

informan ganda, sesuai dengan konsep ini peneliti sudah bisa memetakan dan menentukan informan yang memiliki waktu luang lebih, karena masyarakat di Desa Kendung kebanyakan adalah petani sehingga pada saat siang dan malam hari mereka memiliki waktu senggang yang cukup.

Non analitis, informan tidak dituntut untuk mampu menganalisis pertanyaan dari peneliti, namun diharapkan mampu memahami dengan baik sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Peneliti juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan seputar identitas informan, serta peneliti akan mengajukan pertanyaan secara perlahan dan berulang agar informan jelas dengan pertanyaan dari peneliti. (Spradley, 1997; 69), namun berdasarkan pengalaman lapangan selama satu bulan pada saat observasi, peneliti menemukan beberapa informan yang dianggap mampu menganalisis pertanyaan.

Pada akhirnya peneliti memilih tiga informan yang sesuai dengan syarat yang sesuai dengan spradley. Berikut ini adalah informannya, 1.) Pak Wawan, beliau adalah tokoh masyarakat Desa Kendung, yang dianggap pintar, cerdas dan berani dalam mengkritisi pemerintahan desa, 2.) Mbah Syarif, beliau adalah tokoh masyarakat yang dianggap dukun dalam artian memahami filsafah jawa dan banyak orang dari luar desa yang datang kepada beliau dan pada saat Pemilihan Kepala desa memilih Pak Mulyadi, 3.) Mbah Dho, beliau salah satu sesepuh Desa Kendung yang waktu Pemilihan Kepala desa memilih Pak Sulton.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian “Pilkades dan Konflik di Dalam Masyarakat Desa Kendung, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro”, ini ada empat macam yaitu, observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi.

### **1.6.3.1 Observasi**

Pengamatan akan dilakukan dengan informan yang dapat menunjukkan lokasi serta dapat menguasai daerah yang akan dijadikan lokasi observasi. Pada awalnya peneliti menanyakan kondisi lapangan atau lokasi mana saja yang sesuai dengan tema Penelitian pada kepala desa, serta memberikan surat ijin penelitian. Observasi dampak pasca pilkades terhadap relasi sosial masyarakat Desa Kendung ini dilakukan di Dusun Kendung, karena dampak yang paling berasa kental ada di tempat tersebut.

Hasil pengamatan tersebut akan dijadikan tulisan dan menjadi sumber yang autentik karena berdasarkan fakta pada lapangan dengan pengamatan etnografi. Dengan menyertakan bukti foto dan wawancara pada informan, sehingga data yang disajikan merupakan data yang sesuai dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat.

### **1.6.3.2 Wawancara**

Pengumpulan data dengan observasi didukung dengan wawancara secara mendalam oleh peneliti dengan para informan. serta pengambilan dokumentasi. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman pertanyaan penelitian yang telah dibuat untuk ditanyakan kepada informan. Ketika wawancara dilakukan pertanyaan-pertanyaan mendalam lainnya mungkin akan muncul sesuai dengan cerita pengalaman informan. Peneliti menggunakan *handphone* untuk merekam semua obrolan ketika melakukan wawancara, agar tidak ada data yang terlewatkan dan peneliti tetap fokus dengan informan.

Peneliti dalam melakukan wawancara, menggunakan metode yang wawancara etnografis yang dikemukakan oleh Spradly, menurut Spradly ada tiga unsur yang paling penting dalam melakukan wawancara. 1.) Tujuan yang eksplisit, peneliti dan informan harus menyadari arah pembicaraan agar tidak melenceng, lalu jika informan

mengarah ke arah yang berbeda pembicaraanya, peneliti bisa mengarahkan kembali namun tidak perlu jadi otoriter dalam mengarahkan pembicaraan (Spradley, 1997; 77). 2.) Penjelasan etnografis, peneliti harus menjelaskan tujuan umum penelitian dilakukan terhadap informan (Spradley, 1997; 77). 3.) Pertanyaan etnografis, Spradley dalam menjelaskan pertanyaan etnografis, diidentifikasi dengan tiga tipe utamanya, pertama pertanyaan deskriptif, ini adalah tipe pertanyaan yang memungkinkan informan dapat menjawab dengan umum, kedua pertanyaan struktural, ini digunakan peneliti untuk menemukan informasi unsur-unsur dan pengetahuan budaya dari informan, yang ketiga adalah pertanyaan kontras, pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai hal yang ada dalam istilah yang dimiliki oleh informan dengan bahasa umumnya (Spradley, 1997; 77-78).

#### **1.6.3.3 Studi Pustaka**

Peneliti melakukan studi literatur guna menambah data dan mencari referensi dalam bentuk tulisan, buku, karya ilmiah maupun penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk memastikan dan mencari kesinambungan dari penelitian yang dilakukan.

#### **1.6.3.4 Dokumentasi**

Peneliti akan mendokumentasikan setiap pengambilan data turun lapangan sebagai bukti lapangan. Dengan cara merekam bukti wawancara, melakukan foto atau merekam sebagai data pendukung. Peneliti akan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, serta merekam wawancara pada informan dan menarasikan hasil wawancara. Namun tetap dalam melakukan dokumentasi harus memandang prinsip etika penelitian, jadi peneliti dalam melakukan dokumentasi yang pertama harus mengamankan hak-hak, kepentingan dan sensitivitas informan, kedua peneliti harus menyampaikan tujuan penelitian, ketiga melindungi privasi informan, keempat tidak